

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional, khususnya antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, hubungan perdagangan antara Jepang, Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam pembangunan ekonomi nasional, diperlukan sumber penerimaan negara yang kuat dan berkelanjutan, di mana salah satu sumber yang paling potensial adalah pajak.

Pajak merupakan kontributor utama dalam pembiayaan pembangunan negara. Seiring dengan berjalannya waktu, penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan proyek pemerintah. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak dan target kepatuhan wajib pajak yang terus ditingkatkan. Salah satu aktivitas ekonomi yang secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah kegiatan impor.

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif. Impor tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang konsumsi atau bahan baku, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek fiskal negara karena akan dikenai bea masuk, yaitu

pungutan negara atas barang impor berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peranan penting dalam menyumbang penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional, salah satunya melalui penerimaan bea masuk (Rufaidah & Noviani, 2023).

Setiap tahun, DJBC menetapkan target penerimaan bea masuk yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bea masuk menjadi salah satu indikator kinerja utama DJBC, sehingga pencapaiannya sangat menentukan keberhasilan dalam mendukung stabilitas fiskal negara. Namun demikian, tidak semua barang impor dikenakan bea masuk. Terdapat berbagai ketentuan pembebasan bea masuk, seperti barang-barang yang masuk dalam kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), barang impor bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB (*Free On Board*) USD 50 per orang per kiriman, serta barang-barang lain yang dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Fakta ini menunjukkan bahwa nilai impor yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan bea masuk karena adanya fasilitas pembebasan tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yusmalina et al. (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun target penerimaan bea masuk ditetapkan setiap tahun, realisasi penerimaan cenderung mengalami penurunan akibat berbagai faktor, termasuk pembebasan tarif dan perubahan kebijakan perdagangan.

Menurut Chaerina et al. (2023), nilai impor merupakan asas dasar dalam penghitungan bea masuk, ditambah dengan rincian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai ini biasanya didasarkan pada harga faktur dalam satuan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (20), nilai impor adalah nilai yang dijadikan dasar dalam perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya. Oleh karena itu, perubahan nilai impor akan mempengaruhi perhitungan bea masuk dan selanjutnya berdampak terhadap penerimaan bea masuk.

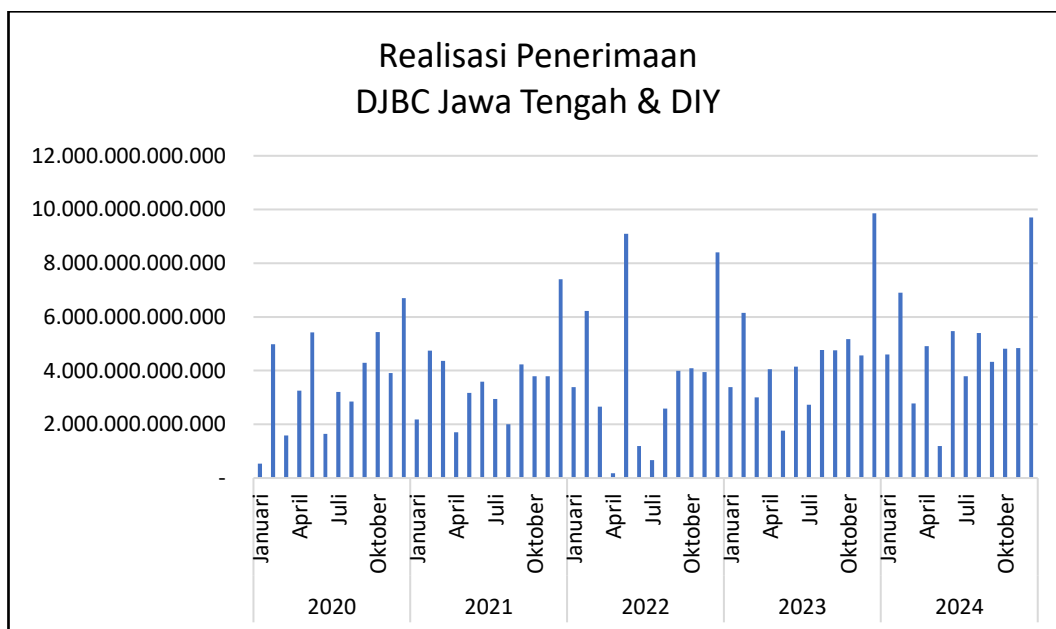
Hal ini diperkuat oleh penelitian Noviani & Andalusia (2020) yang menunjukkan bahwa nilai pabean berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk. Artinya, apabila nilai impor meningkat, maka penerimaan bea masuk juga akan meningkat, dengan asumsi tidak ada fasilitas pembebasan. Dengan demikian, nilai impor dan bea masuk dapat dijadikan variabel bebas yang diyakini berpengaruh terhadap realisasi penerimaan negara.

Realisasi penerimaan negara merupakan hasil aktual atas target anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, yang dihitung secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks DJBC, target penerimaan dibebankan secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke Kantor Wilayah DJBC, yang kemudian didistribusikan ke masing-masing Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah tersebut (Manajemen et al., 2024).

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah yang memiliki aktivitas perdagangan luar negeri yang cukup tinggi,

ditunjang oleh keberadaan pelabuhan dan kawasan industri. Aktivitas impor di wilayah ini berdampak langsung terhadap realisasi penerimaan bea dan cukai, khususnya dari sektor bea masuk. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sejauh mana nilai impor dan bea masuk berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY.

Grafik 1. 1 Realisasi Penerimaan Kantor DJBC Jawa Tengah dan DIY Tahun 2020-2024



Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan Grafik 1.1, realisasi penerimaan pada Kantor DJBC Jawa Tengah dan DIY selama bulan Januari 2020 hingga Oktober 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif antar triwulan, namun secara umum menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai realisasi penerimaan berada pada kisaran Rp5 triliun di triwulan pertama (Januari), mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar Rp3 triliun pada triwulan kedua (April), kemudian

meningkat menjadi sekitar Rp4 triliun pada triwulan ketiga (Juli), dan mencapai sekitar Rp5,5 triliun di triwulan keempat (Oktober). Penurunan penerimaan pada April 2020 sejalan dengan awal merebaknya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya arus perdagangan internasional, tertundanya impor barang, dan berkurangnya permintaan global. Tahun 2021 juga mencerminkan pola yang fluktuatif, dengan penerimaan Januari sekitar Rp6,8 triliun, menurun menjadi sekitar Rp5 triliun pada April, kemudian kembali menurun di Juli sekitar Rp4 triliun, dan sedikit pulih pada Oktober menjadi sekitar Rp5 triliun. Fluktuasi ini mencerminkan dampak lanjutan dari pemulihan ekonomi yang belum stabil serta adanya pembatasan perdagangan di beberapa negara mitra.

Memasuki tahun 2022, realisasi penerimaan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Triwulan pertama (Januari) mencatat angka sekitar Rp7,5 triliun, melonjak pada triwulan kedua (April) hingga mencapai Rp9 triliun, lalu menurun pada Juli menjadi sekitar Rp6 triliun, dan kembali turun pada Oktober ke kisaran Rp4 triliun. Lonjakan pada April 2022 mencerminkan meningkatnya aktivitas impor akibat pulihnya industri manufaktur domestik dan meningkatnya kebutuhan bahan baku serta barang modal. Di sisi lain, penurunan pada Juli dan Oktober menunjukkan adanya efek musiman, seperti melambatnya kegiatan impor pasca hari raya keagamaan dan kuartal tengah tahun yang umumnya lebih rendah dibanding kuartal akhir. Tahun 2023 menjadi salah satu tahun dengan capaian penerimaan tertinggi, dimulai dengan Rp4 triliun pada Januari, meningkat menjadi Rp6 triliun pada April, sedikit menurun di Juli sekitar Rp5 triliun, dan mencapai puncaknya pada Oktober dengan angka hampir Rp10 triliun. Penerimaan yang

tinggi di kuartal keempat secara konsisten menunjukkan adanya pola musiman di mana importir cenderung meningkatkan volume impor menjelang akhir tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pasar dan sekaligus menyelesaikan kewajiban fiskal sebelum tutup buku.

Tahun 2024 menunjukkan pola yang relatif mirip dengan tahun sebelumnya. Pada Januari, penerimaan berada pada kisaran Rp4,5 triliun, meningkat menjadi Rp6 triliun pada April, turun sedikit di Juli menjadi Rp5 triliun, dan kembali mencapai angka tertinggi sekitar Rp10 triliun pada Oktober. Konsistensi pencapaian tertinggi pada triwulan keempat dalam dua tahun terakhir memperkuat dugaan bahwa realisasi penerimaan sangat dipengaruhi oleh siklus anggaran tahunan, strategi perencanaan impor korporasi, serta tekanan dari pemerintah terhadap instansi pemungut untuk mengejar target penerimaan negara di akhir tahun. Selain faktor musiman, fluktuasi juga dapat dikaitkan dengan perubahan volume dan nilai impor barang, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta kebijakan tarif bea masuk yang berlaku. Kenaikan pada beberapa periode kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh penguatan sistem pengawasan, digitalisasi layanan kepabeanan, serta peningkatan kepatuhan importir dalam melaporkan transaksi impornya secara benar. Sebaliknya, penurunan dapat pula terjadi karena adanya relaksasi tarif, percepatan pembebasan atau penangguhan bea masuk untuk industri strategis, atau perlambatan ekonomi global yang menurunkan aktivitas perdagangan internasional. Dengan demikian, meskipun realisasi penerimaan mengalami naik turun pada setiap triwulan, pola keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif, yang menandakan

keberhasilan DJBC Jawa Tengah dan DIY dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor kepabeanan di tengah berbagai tantangan domestik maupun global.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak selalu sejalan dengan peningkatan nilai impor, yang kemungkinan dipengaruhi oleh struktur tarif impor, perubahan komoditas impor, dan kebijakan fiskal yang diberlakukan selama periode tersebut.

Data ini memperkuat urgensi penelitian mengenai hubungan antara nilai impor dan bea masuk terhadap realisasi penerimaan, agar dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai target penerimaan negara. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui optimalisasi sektor kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH NILAI IMPOR DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN DI KANWIL DJBC JAWA TENGAH DAN DIY TAHUN 2020–2024 (Studi pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY)”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan pengaruh Nilai Impor, dan Bea Masuk terhadap realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY dalam periode tahun 2020-2024 adalah :

1. Bagaimana pengaruh Nilai Impor terhadap realisasi penerimaan impor barang kena pajak pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY?
2. Bagaimana pengaruh Penerimaan Bea Masuk terhadap realisasi penerimaan impor barang kena pajak pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY?
3. Bagaimana interaksi antara Nilai Impor, dan Bea Masuk dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh Nilai Impor, dan Bea Masuk atas impor barang kena pajak terhadap realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan nilai impor terhadap realisasi penerimaan impor barang kena pajak pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan bea masuk terhadap realisasi penerimaan impor barang kena pajak pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY.
3. Untuk mengetahui bagaimana interaksi antara penerimaan bea masuk, dan nilai impor, dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, baik untuk akademik, praktis, maupun kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur dalam bidang ekonomi, perpajakan, dan perdagangan internasional, khususnya mengenai penerimaan negara.

2. Referensi untuk Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa, baik di Indonesia maupun di negara lain.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada para praktisi perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Impor, dan Bea Masuk sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran pokok masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini, maka dalam penulisannya disusun ke dalam lima bab yang meliputi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menelaah tentang pembahasan lingkup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua menjelaskan kerangka teori landasan penelitian serta membahas temuan penelitian sebelumnya, juga mencakup kerangka kerja dan pembentukan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan serta Teknik yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Definisi operasional variable, populasi dan sampel, berbagai jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan metodologi analisis yang digunakan akan dijelaskan dalam pendekatan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian, analisis olah data, interpretasi hasil data untuk temuan tercakup dalam bab ini, bersama dengan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini, keterbatasannya, dan rekomendasi untuk penelitian tambahan disajikan dalam bab ini.